

Pengaruh Kebijakan Pendidikan Belanda Terhadap Struktur Sosial Lokal

Rosmaida Sinaga¹ Friska Fransiska Aruan² Ilmiyatul Fitri Charisma³ Yosua Solafide Sinaga⁴

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹ friskaaruan2017@gmail.com²
ilmiatullilmiatul@gmail.com³ yosuasinaga.3233321003@mhs.unimed.ac.id⁴

Abstrak

Struktur sosial lokal dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendidikan kolonial memengaruhi pembentukan hierarki sosial, memperluas kesenjangan kelas, dan mempengaruhi mobilitas sosial di kalangan masyarakat pribumi. Kebijakan yang awalnya bertujuan untuk mencetak pegawai administrasi kolonial terbatas pada kalangan elit pribumi, menghasilkan lapisan baru dalam masyarakat yang dikenal sebagai priyayi. Belanda memperkuat stratifikasi sosial dengan membagi akses pendidikan berdasarkan status sosial. Ini menciptakan perbedaan yang lebih tajam antara kelompok elit dan rakyat jelata. Dokumen kebijakan pendidikan dan laporan kolonial dipelajari dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan historis-kritis. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pendidikan kolonial tidak hanya membantu Belanda mengontrol ekonomi dan politik, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang menguntungkan para elit lokal dan melemahkan keharmonisan masyarakat tradisional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kolonialisme Belanda dan pengaruhnya terhadap tatanan sosial di bidang pendidikan Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Kolonial, Belanda, Indonesia, Stratifikasi Sosial

Abstract

The local social structure was significantly influenced by the education policies implemented by the Dutch colonial government in Indonesia. The aim of this research is to examine how colonial education influenced the formation of social hierarchies, widened class gaps, and affected social mobility among indigenous communities. The policy that was originally aimed at producing colonial administrative staff was limited to the elite indigenous class, resulting in a new layer in society known as the priyayi. The Dutch reinforced social stratification by dividing access to education based on social status. This creates a sharper divide between the elite and the common people. The education policy documents and colonial reports are studied in this research, which employs a historical-critical approach. The results show that the colonial education system not only helped the Dutch control the economy and politics but also created a social structure that benefited local elites and weakened the harmony of traditional society. This research makes an important contribution to understanding the dynamics of Dutch colonialism and its influence on the social order in the field of education in Indonesia.

Keywords: Colonial Education Policy, Dutch, Indonesia, Social Stratification



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Akhir abad ke-16 dan awal ke-17 merupakan giliran bagi orang-orang Belanda untuk menanam dan memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Pemerintah Belanda, melalui keputusan sidang Staten Generaal (parlemen), memberikan kekuasaan penuh kepada VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perserikatan kongsi dagang Belanda di Hindia Timur, untuk mengendalikan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Hingga pada akhir abad ke-17, mereka berhasil mengisolasi Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga

dapat mengawasi lalu lintas antarpulau di perairan Nusantara. Kebijakan politik dan upaya untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia dilaksanakan dan didukung melalui usaha di bidang pendidikan, tujuan, isi, proses, dan pihak yang terlibat. Misalnya, orang Belanda dan anggota keluarganya membutuhkan pendidikan dan latihan, baik secara umum maupun khusus (Makmur et al., 1993). Di sisi lain, VOC membutuhkan tenaga kerja pembantu murah untuk mengatur pemerintahan dan ekonomi. yang pasti diambil dari penduduk lokal. Untuk memungkinkan mereka melakukan tugas-tugas tersebut, mereka harus diberikan pendidikan yang tepat. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pendidikan juga digunakan untuk membina kelompok-kelompok penduduk pribumi yang dapat diandalkan dalam kesetiaannya kepada orang Belanda, seperti komunitas emigran Kristen di Ambon.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda di Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga digunakan sebagai alat politik dan sosial untuk memperkuat kekuasaan kolonial. Pemerintah kolonial mengatur dan mengendalikan pendidikan dengan fokus pada pengembangan kelompok sosial tertentu, khususnya kaum elit pribumi yang dianggap dapat mendukung kepentingan kolonial. Akses ke pendidikan formal sangat terbatas dan bersifat diskriminatif, hanya diberikan kepada kalangan bangsawan, pegawai pemerintah kolonial, serta individu-individu keturunan Eropa atau pribumi yang memiliki status tinggi. Diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan faktor-faktor seperti gender, ras, agama, usia, atau karakteristik lainnya. (Sarina et al., 2021). Kebijakan pendidikan Belanda ini menciptakan struktur sosial yang baru di kalangan masyarakat lokal. Pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk sekolah-sekolah gubernemen menumbuhkan kelas menengah terdidik yang pada akhirnya berfungsi sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah kolonial. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menciptakan ketidakadilan sosial, di mana sebagian besar rakyat jelata tetap tidak mendapatkan akses pendidikan dan terus hidup dalam kemiskinan serta kebodohan. Dampak dari kebijakan pendidikan Belanda terhadap struktur sosial lokal tampak melalui terbentuknya lapisan masyarakat yang semakin beragam. Kelas menengah terdidik yang sebagian besar berasal dari kalangan priyayi mulai muncul, menciptakan struktur sosial baru yang memperlebar kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah. Selain itu, pendidikan kolonial turut memperkuat dominasi budaya dan politik Belanda di daerah jajahan, dengan mengutamakan bahasa, nilai-nilai, dan norma-norma Eropa sebagai standar dalam kehidupan Masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan pendidikan Belanda terhadap struktur sosial lokal di Hindia Belanda, serta mengeksplorasi perubahan sosial yang terjadi akibat penerapan sistem pendidikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi sejarah yang bertujuan untuk meneliti dan merekonstruksi peristiwa masa lalu terkait objek yang dikaji melalui penerapan metode sejarah. Dalam kerangka ilmu pengetahuan, metode sejarah adalah seperangkat prosedur, alat, atau sarana yang digunakan oleh sejarawan untuk meneliti dan menyusun penulisan sejarah. Proses ini melibatkan empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Tahap pertama, yaitu heuristik, mencakup proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin sumber sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian berjudul "Pengaruh Kebijakan Pendidikan Belanda Terhadap Struktur Sosial Lokal". Setelah terkumpul, sumber-sumber tersebut ditelaah untuk mengevaluasi keabsahan informasi yang ada. Sumber berupa jurnal ilmiah dan buku dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Tahap terakhir, yakni historiografi, adalah proses penelaahan dan interpretasi yang

kemudian disusun dalam bentuk narasi sesuai dengan kaidah dan format penulisan artikel yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal kedatangan Belanda

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Pada saat itu, Belanda berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah Asia, khususnya Indonesia, untuk mendapatkan akses langsung ke rempah-rempah.(Makmur et al., 1993) Ketika Portugis jatuh di bawah kekuasaan Spanyol pada tahun 1585, Belanda yang sedang berperang untuk memerdekakan diri dari Spanyol terpaksa mencari cara baru untuk memperoleh barang-barang dagangan, termasuk rempah-rempah dari Indonesia. Tujuan utama kedatangan mereka adalah murni untuk kepentingan ekonomi, berbeda dengan Portugis yang juga memiliki tujuan menyebarkan agama dan berpetualang.(Makmur et al., 1993) Pada tahun 1605, Belanda berhasil mengambil alih posisi Portugis di Maluku Selatan, khususnya di Ambon. Ini menjadi awal dominasi Belanda di Indonesia. Pada tahun 1619, Belanda mendirikan pusat perdagangan di Jayakarta, yang kemudian mereka ubah namanya menjadi Batavia (sekarang Jakarta). Batavia menjadi pusat kekuasaan Belanda dan basis mereka untuk mengendalikan perdagangan dan politik di Nusantara. Dengan kekuatan armada laut yang kuat, Belanda berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengawasi lalu lintas laut antar pulau di Indonesia. Walaupun jumlah orang Belanda di Indonesia relatif sedikit, mereka memiliki kekuatan besar berkat persatuan, disiplin, dan organisasi yang baik. Sementara itu, banyak kerajaan lokal di Indonesia justru sibuk dengan konflik internal sehingga kurang memperhatikan ancaman dari Belanda. Kebijakan Belanda, khususnya melalui VOC, semakin memperkuat cengkeraman mereka di Indonesia. Mereka memanfaatkan sistem pendidikan dan agama untuk memperkuat loyalitas penduduk setempat, termasuk dengan mengembangkan agama Kristen Protestan di kalangan masyarakat pribumi.

Dalam bidang pendidikan, VOC pada awalnya tidak banyak terlibat secara langsung. Mereka menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada gereja-gereja Protestan yang ada. Pendidikan ini dimulai dari Maluku, di mana Belanda mengambil alih sekolah-sekolah yang sebelumnya didirikan oleh Portugis. Tujuan utama pendidikan ini adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen Protestan dan mencetak tenaga kerja yang loyal kepada Belanda. Selain itu, pendidikan juga digunakan untuk mendukung administrasi kolonial Belanda, termasuk mendidik penduduk pribumi untuk menjadi tenaga kerja yang murah dan efisien.(Makmur et al., 1993) Pada perkembangan berikutnya, pendidikan menjadi salah satu alat politik bagi Belanda untuk mengokohkan kekuasaannya di Indonesia. Bahasa Belanda dan Melayu klasik digunakan dalam proses pembelajaran, terutama untuk memperkuat kontrol Belanda atas masyarakat lokal. Pendidikan ini juga bertujuan untuk membina kelompok-kelompok yang setia kepada Belanda, seperti komunitas Kristen di Ambon, yang kemudian menjadi pendukung kuat kekuasaan kolonial di daerah tersebut.

Awal Penerapan kebijakan Pendidikan

Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, pendidikan di Nusantara, khususnya di Maluku, mengalami perubahan besar dengan hadirnya sistem pendidikan Barat. Awalnya, orang Portugis yang memperkenalkan sekolah-sekolah yang berkaitan erat dengan ajaran agama Kristen Katolik.(Makmur et al., 1993) Sekolah-sekolah ini dibangun di wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Namun, ketika Belanda mengambil alih kekuasaan dari Portugis, mereka meneruskan model pendidikan ini, tetapi dengan penekanan pada agama Kristen Protestan. Pendidikan pada masa itu terutama diatur oleh gereja, dengan keterlibatan pemerintah kolonial yang terbatas.(Makmur et al., 1993) Pendidikan di Maluku berlanjut

dengan tujuan utama mengintegrasikan masyarakat pribumi ke dalam sistem kolonial Belanda. Guru-guru agama yang dikenal sebagai "*school-meesters*" dilatih untuk memimpin jemaat dan mengajar anak-anak. Materi pengajaran difokuskan pada kemampuan membaca, menulis, dan menyanyi, semuanya terkait erat dengan pelajaran agama. Pada awalnya, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda, namun seiring waktu, bahasa Melayu klasik juga digunakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. (Makmur et al., 1993) Pada abad ke-17, pendidikan di Ambon berkembang pesat, terutama di kalangan bangsawan. Sekolah-sekolah ini membantu menyebarkan ajaran Kristen Protestan dan memperkuat kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Buku-buku pelajaran berbahasa Belanda tidak hanya digunakan untuk mengajarkan keterampilan bahasa tetapi juga untuk menyebarkan nilai-nilai agama Kristen dan moralitas yang dianggap penting oleh pemerintah kolonial. (Makmur et al., 1993)

Seiring berjalannya waktu, pendidikan kolonial Belanda di Indonesia mulai menunjukkan perbedaan antara pendidikan formal yang diperkenalkan oleh Belanda dan pendidikan tradisional seperti pesantren. (Sultani & Kristanti, 2020) Anak-anak sering menghadiri sekolah Belanda di pagi hari untuk mempelajari keterampilan praktis, sementara pada sore hari mereka belajar agama di sekolah Islam. Dualisme pendidikan ini menciptakan ketegangan antara pendidikan Barat dan tradisi lokal. (Sultani & Kristanti, 2020) Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, pendidikan di Indonesia belum terstruktur dengan baik dan hanya terbatas untuk kelompok tertentu. Inisiatif untuk memberikan pendidikan kepada penduduk pribumi sering kali terhambat oleh kurangnya dana dari pemerintah kolonial. Misalnya, rencana pendidikan yang diajukan oleh Capellen untuk pribumi gagal karena kekurangan anggaran, meskipun beberapa sekolah untuk anak pribumi berhasil didirikan di beberapa daerah seperti Pasuruan, Karawang, dan Cianjur. Baru pada pertengahan abad ke-19, pendidikan Barat mulai diterapkan dengan lebih sistematis. Namun, tujuan utama pendidikan ini adalah untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan pemerintah kolonial, bukan untuk membentuk sistem pendidikan nasional yang inklusif. Kebijakan pendidikan di bawah era Etis mulai mencoba memperluas akses pendidikan bagi pribumi, tetapi tetap di bawah kendali ketat pemerintah kolonial. (Sultani & Kristanti, 2020) Pada akhirnya, meskipun pendidikan ini awalnya dimaksudkan untuk mendukung kepentingan kolonial, hal tersebut malah memicu kebangkitan kesadaran nasional di kalangan terpelajar pribumi. Para pemuda yang menerima pendidikan ini mulai menyadari ketidakadilan yang mereka alami, dan banyak dari mereka terlibat dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Pendidikan yang pada awalnya bertujuan untuk mengendalikan masyarakat pribumi, justru menjadi alat untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang akhirnya berujung pada perjuangan melawan penjajahan.

Kebijakan Pendidikan Masyarakat oleh Belanda

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia sejak awal abad ke-19 memiliki tujuan utama untuk melayani kebutuhan pemerintahan kolonial, bukan untuk memberdayakan masyarakat pribumi. Meskipun beberapa upaya pendidikan dilakukan, kebijakan ini pada dasarnya diskriminatif dan membatasi akses pendidikan hanya bagi golongan tertentu. Pendidikan yang disediakan oleh Belanda sangat didasarkan pada garis rasial dan sosial, di mana anak-anak Eropa, Cina, dan elite pribumi mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak pribumi biasa. (Prayudi & Salindri, 2015) Sejak kedatangan Belanda sebagai penguasa politik di Nusantara, kebijakan pendidikan yang diterapkan merupakan bagian dari imperialisme modern. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berusaha keras untuk menguasai wilayah kolonialnya dan mengeksploitasi sumber daya manusia. Untuk itu, mereka memerlukan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung ekonomi Barat yang sedang berkembang pesat. Akibatnya, pemerintah kolonial mengembangkan sistem pendidikan untuk menciptakan

tenaga kerja murah yang terdidik, dengan menekankan pada pembukaan sekolah-sekolah yang dapat mendidik rakyat Bumiputera agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor lainnya.(Siregar, 2016) Pada awalnya, Gubernur Jenderal Daendels berupaya mendirikan sekolah-sekolah di Hindia Belanda pada tahun 1808 dengan melibatkan para bupati. Namun, upaya ini gagal karena kurangnya dana. Barulah pada tahun 1816, setelah dibentuknya Komisaris Jenderal oleh pemerintah Belanda, perhatian mulai diberikan pada pendidikan, tetapi hanya terbatas untuk anak-anak Belanda. Sekolah pertama bagi anak-anak Belanda didirikan di Jakarta pada tahun 1817, dan kemudian diikuti dengan pendirian sekolah-sekolah di berbagai kota di Jawa.(Sultani & Kristanti, 2020)

Pada akhir abad ke-19, terjadi perubahan politik signifikan di Belanda yang mempengaruhi kebijakan kolonial di Indonesia. Artikel Van Deventer tahun 1899 berjudul "Hutang Kehormatan" memicu perubahan drastis dalam kebijakan pemerintah Belanda. Politik etis, yang dicanangkan pada tahun 1901, mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi sebagai tanggung jawab moral kolonial. Namun, kebijakan ini sering kali hanya bersifat kosmetik dan tidak sepenuhnya mengubah sistem pendidikan yang diskriminatif. Antara tahun 1900-1940, terdapat perubahan dari pendidikan elitis menuju pendidikan yang lebih populis. Pemerintah Belanda mulai membuka lebih banyak sekolah untuk rakyat jajahan dengan tujuan meningkatkan kesempatan pendidikan bagi Bumiputera.(Siregar, 2016) Namun, sistem pendidikan tetap diskriminatif dengan adanya perbedaan antara sekolah untuk golongan elit dan sekolah untuk rakyat biasa. Pembukaan sekolah guru juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar untuk mendukung pendidikan kolonial (Nasution, 1997). Pendidikan kolonial Belanda dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan kolonial, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal secara mendalam. Sistem pendidikan bersifat dualistik dengan pemisahan tajam antara sekolah Eropa dan sekolah pribumi. Diskriminasi sosial terlihat dari biaya pendidikan yang tinggi dan keberpihakan terhadap anak-anak dari keluarga priyayi (pegawai pemerintah kolonial).

Sekolah-sekolah seperti ELS (Europese Lagere School) dan HBS (Hogere Burger School) hanya dapat diakses oleh golongan elit, baik Eropa maupun pribumi yang dianggap berstatus tinggi.(Sumarsono, 1996) ELS adalah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda dan terutama diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan golongan bangsawan dengan lama belajar 7 tahun. HBS adalah sekolah menengah yang menyediakan jalur untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Belanda, namun akses untuk anak-anak Bumiputera sangat terbatas karena berbagai faktor diskriminatif, termasuk biaya sekolah yang tinggi dan persyaratan bahasa.(Siregar, 2016) & (Frankema, 2014: 5). Diskriminasi dalam pendidikan terlihat dari perbedaan akses dan kurikulum yang diterapkan. Pendidikan untuk anak-anak Bumiputera sering kali tidak disusun secara sistematis dan lebih berfokus pada kebutuhan kolonial. Pemerintah Belanda membatasi jumlah anak Bumiputera yang dapat memasuki sekolah elit dengan berbagai kebijakan, seperti batas usia dan biaya sekolah yang lebih tinggi. Kebijakan pendidikan kolonial Belanda menunjukkan upaya untuk mendidik tenaga kerja yang murah dan mendukung kepentingan kolonial. Meskipun ada beberapa perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi, praktik pendidikan yang diterapkan tetap diskriminatif dan terbatas pada golongan elit. Sistem pendidikan kolonial cenderung memperkuat stratifikasi sosial dan membatasi kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Awal kedatangan Belanda di Kepulauan Maluku Selatan memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang terkait dengan penyebaran agama Kristen, dengan sekolah-sekolah

pertama didirikan oleh Portugis. Setelah Belanda mengambil alih, pendidikan awal hanya dilanjutkan tanpa perubahan signifikan, hingga VOC mulai menyesuaikan tujuan pendidikan untuk mendukung pengembangan agama Kristen Protestan dan loyalitas terhadap kekuasaan kolonial. Kedatangan Daendels pada tahun 1808 membawa pembaruan pendidikan, tetapi terbatas karena biaya. Pada tahun 1816, PKB mulai fokus pada pendidikan untuk anak-anak Belanda, dengan jumlah sekolah di Jawa meningkat dari 7 pada 1820 menjadi 57 pada 1857. Sistem pendidikan kolonial tersegmentasi berdasarkan ras dan status sosial, dengan perbedaan signifikan antara pendidikan untuk Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Pendidikan kolonial Belanda cenderung tidak mengutamakan kepentingan pribumi, melainkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kolonial dan mengontrol penduduk. Ciri-ciri sistem pendidikan termasuk gradualisme, dualisme, kontrol ketat, keterbatasan tujuan, dan kurangnya perencanaan sistematis untuk pribumi. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda dibagi menjadi ELS untuk keturunan Eropa, HIS untuk keturunan Indonesia, dan HCS untuk keturunan Cina. Menjelang akhir abad ke-19, keturunan Cina mulai membenci diskriminasi dan mendesak untuk sekolah khusus, yang memunculkan pendirian HCS dengan Bahasa Kuo Yu sebagai bahasa pengantar. Meskipun terdapat kesenjangan antara keturunan Cina dan pribumi dalam hal melek huruf, sistem pendidikan kolonial tidak dirancang untuk meningkatkan kesempatan bagi semua anak bangsa Indonesia. Sebaliknya, pendidikan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai penjajah dan menjaga ketundukan serta eksploitasi penduduk pribumi (Siregar, 2016).

Saran

Sebagai langkah berikutnya, penelitian lebih mendalam diperlukan untuk memahami dampak sistem pendidikan kolonial Belanda terhadap pembentukan identitas sosial dan politik di Indonesia. Fokus penelitian sebaiknya mencakup bagaimana pendidikan kolonial tidak hanya menciptakan kesenjangan antar kelompok etnis, tetapi juga membentuk pola pikir dan dinamika sosial yang berlanjut hingga era pasca-kolonial. Analisis mendalam mengenai efek jangka panjang dari dualisme pendidikan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, akan memberikan wawasan tambahan tentang kontribusi sistem ini terhadap ketidaksetaraan. Selain itu, penting untuk menyelidiki bagaimana pendidikan kolonial mempengaruhi kesadaran politik di kalangan pribumi dan perannya dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang warisan pendidikan kolonial dan dampaknya terhadap struktur sosial dan politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Frankema, Ewout H.P. 2014. Why was the Dutch legacy so poor? Educational Development in the Netherlands Indies, 1871-1942. CGEH Working Paper Series No. 54. Utrecht, Netherlands: Centre for Global Economic History Universiteit Utrecht.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014b. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1900-1942: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jilid 2. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah (Baru). Tiara Wacana.
- Makmur, D., Haryono, P. S., Musa, S., & S., H. (1993). Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan. In Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional: Vol. (1993rd Ed., Issue). Cv. Manggala Bhakti.
- Nasution, S. (1997). Sejarah Pendidikan Indonesia. Bumi Aksara.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Sejarah-Pendidikan-Indonesia-Nasution/cf8e80fc0b827af734b871c9d19321bd48a2831>

- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20–34.
- Siregar, E. (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pendidikan Kaum Bangsawan Di Indonesia (1900-1920). *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 3(1), 21–26.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3518>
- Sumarsono, M. (1996). Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman. Balai Pustaka.